

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menarik kesimpulan sesuai dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai Tata Kelola Sistem Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) di dalam lingkup Bidang *E-Government* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

6.1.1 Indikator tata kelola *E-Gov* adalah sebagai berikut:

➤ Kebijakan

Yang termasuk dalam indikator kebijakan adalah regulasi, strategi yang utuh dan manajemen risiko. Berkaitan dengan regulasi diskominfo mengikuti aturan terbaru dari pemerintah yaitu UU.NO.14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa harus ada regulasi yang jelas, dan butuh keseriusan dari pemerintah untuk mengatasi persoalan ini, nanti akan berdampak pada OPD yang memiliki aplikasi tersendiri yang berjalan masing-masing dan ini tidak terkoneksi. Oleh karena itu perlu dituntaskan melalui regulasi. Ini menjadi kesempatan yang baik untuk Diskominfo biar ada kejelasan dalam pengelolaan TIK di dinas. Dengan adanya Rencana Induk maka sudah ada dasar hukum sehingga dalam pengembangan informasi dan teknologi sudah ada dasarnya untuk kedepan.

➤ Infrastruktur Jaringan

Infrastruktur jaringan meliputi perangkat keras dan perangkat lunak. Salah satu misi Diskominfo adalah meningkatkan sarana dan jaringan serta daya jangkau infrastruktur komunikasi dan informatika yang representatif. Teknologi jaringan komputer merupakan suatu teknik penyebarluasan informasi yang dihasilkan dari proses pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi komputer untuk berkomunikasi. Fasilitas pendukung seperti *Software* dan *hardware* yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika masih masih sangat terbatas.

➤ Sistem Aplikasi

Berdasarkan hasil penelitian berkaitan dengan Aplikasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika pada tahun 2016 sebanyak 3 Aplikasi yakni SIP PPID, SMS Gateway dan Sistem Pelayanan Informasi Masyarakat (SIPIM) namun belum dikelola secara baik. Diskominfo telah mengembangkan kurang lebih 30 website untuk 30 OPD. Hampir setiap OPD sudah ada aplikasi pendukung yang dikembangkan oleh pihak ketiga maupun oleh kantor PDE. Website resmi yang dikelola oleh Diskominfo dengan satu domain yaitu [www.nttprov.go.id](http://www.nttprov.go.id). Jika ada lembaga lain atau OPD lain yang butuh update di web mereka bisa meminta sub domain ke Diskominfo.

➤ Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil penelitian, Sumber Daya Manusia berkaitan dengan Alokasi anggaran dan staf/pegawai masih memiliki kendala. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah sumberdaya manusia yang memiliki keahlian dalam penguasaan teknologi masih terbatas dalam pengembangan tata kelola *e-goverrment*. Anggaran yang dimiliki sangat terbatas untuk mendukung pengembangan tata kelola TIK.

## 6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas maka dapat direkomendasikan saran-saran untuk Dinas Kominfo khususnya pada Bidang e-Gov sebagai berikut :

- Saran untuk Diskominfo, harus menyiapkan kebijakan dalam pengelolaan dan pengembangan e-gov, penyusunan norma, prosedur dan kriteria terhadap fungsi Dinas Kominfo yang berkaitan dengan tata kelola e-Gov. Diskominfo juga harus memberikan kesempatan bagi pengembangan dan peningkatan kualitas aparatur melalui pendidikan dan latihan yang teratur, terarah dan berkesinambungan termasuk seminar dan workshop, dan juga pemerintah harus mendukung pengembangan e-gov dengan menyediakan fasilitas yang memadai. Agar terciptanya tata kelola yang baik berbasis TIK.
- Diharapkan agar Diskominfo menyediakan dokumen rencana induk e-gov yang merupakan rujukan terhadap rencana anggaran dalam pengembangan dan pemanfaatan TIK, Melakukan secara terus-menerus

sosialisasi *e-government*, pelatihan dan bimtek, melakukan pengembangan dan pemanfaatan TIK secara profesional sesuai dengan tanggung jawab bidang. kemudian melakukan pembinaan secara berjenjang bagi seluruh staf guna mendorong staf tetap kreatif, inovatif dan bersemangat dalam menjalankan tupoksi masing-masing, dan perlu adanya insentif dan penghargaan bagi staf yang menjalankan tugas dengan baik ini semua dilakukan guna meningkatkan semangat dan komitmen mereka dalam mendukung tata kelola e-gov yang ada di dinas kominfo khususnya bidang e-gov.

- Diharapkan untuk Bagian Tata Kelola dan aplikasi bidang e-Gov untuk meningkatkan pengamanan melalui security agar tidak terjadi resiko yang tidak kita inginkan. Dan apabila itu terjadi bisa diminimalisir dengan baik. Kerjasama yang sinergis antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan untuk menjaga stabilitas keuangan, dan fiskal harus terus ditigkatkan untuk menjawab berbagai kemungkinan ancaman krsis disektor keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku:

- Baccal, Robert. 1999. *Performance Management*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dharma, Surya. 2013. *Manajemen Kinerja: Falsafah Teori dan Penerapannya*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Djojosoedarso, Soeisno. 1999. *Prinsip- Prinsip Manajemen Resiko dan Asuransi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fatta, H. 2007. *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi untuk Keunggulan Bersaing Perusahaan dan Organisasi Modern*. Yogyakarta: Andi Ofiset.
- Hasibuan, Malayu. 2011. *Manajemen Dasar dan Pengertian Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Indrajit. 2005. *Strategi Manajemen Pembelian dan Supply Chain*. Jakarta: Grafindo.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2008. *Akuntabilitas Birokrasi Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nurudin. 2017. *Perkembangan Teknologi Komunikasi*. Surabaya: PT. Raja Grafindo Persada.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Patilima, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Rochaety, Ety, dkk. 2006. *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Simarmata, Janner. 2006. *Pengenalan Teknologi Komputer dan Informasi*. Yogyakarta: Andi Ofiset.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D*. Bandung: Alfabeta.
- Zaenudin, Arif dan Mutiarin Dyah. 2014. *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

### **Jurnal- Jurnal:**

Chen, Yu-Che dan James Perry. 2003. *Outsourcing For E- Government: Managing For Success*, dalam *Public Performance & Management Review*, Vol. 26, No. 4.

Marcel. 2012. *Tata Kelola Teknologi Informasi untuk Menggali Manfaat Strategis Teknologi Informasi bagi Bisnis*. Jurnal Teknik dan Komputer, Vol. 1 No. 4, Oktober- Desember 2012

Scriven, Michael. 1969. *Evaluation Educational Programs*. The Urban Review, Vol. 9 No. 4.

### **Skripsi:**

Vitaria Juliet Banfatin. 2017. *Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Electronic Government pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Skripsi, FISIP/IPM Unwira Kupang.

Wiliasta, Hardika Kristia. 2012. *Analisis Tata Kelola IT di Kabupaten Semarang Menggunakan Cobit 4.1 Domain Plan and organize studi kasus bagian PDE Kabupaten Semarang*. Skripsi, Universitas Kristen Satya Wacana.

### **Tesis:**

Alvin, Alvin dan Soekamto, Wongso dan Harsono, Riny dan Ce, S. Kom.MM, Win. 2013. *Analisis dan Evaluasi Tata Kelola IT pada PT. FIF dengan Standar Cobit 5*. Undergraduated thesis, BINUS, Jakarta.

### **Internet:**

<https://prezi.com.sistem-teknologi-informasi-dan-komunikasi.html>

### **Sumber Lain:**

- Information Technology Governance Institute, 2003.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan *Electronic Government*.

- Peraturan Menteri Keuangan No.7 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, No. 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 Tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional.
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Permendagri No 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- Sumber Data Primer Bidang *E- Government* Diskominfo Provinsi Nusa - Tenggara Timur.
- Sumber Data Primer Bidang *E- Government* Diskominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur